

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

**Ilyas Makmur<sup>1</sup>, Usamah<sup>2</sup>, Rini Hidayah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan  
Pekalongan

Korespondensi email: [Ilyas011023@gmail.com](mailto:Ilyas011023@gmail.com)

Diterima : 15 Agustus 2024 Direvisi : 25 November 2025, Disetujui : 03  
Desember 2025

## *Abstrak*

*Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang sangat luas pada sektor perekonomian, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang, yang melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebagai langkah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 sesuai dengan ketentuan terkait realokasi anggaran, baik yang bersumber dari dana transfer maupun penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Batang sebelum terjadinya pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Batang apabila dilihat dari rasio rata-rata Kemandirian Keuangan sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Dilihat dari Rasio Fleksibilitas Keuangan saat pandemi justru mengalami peningkatan, dan pasca pandemi mengalami penurunan. Rasio Solvabilitas Operasional masa pandemi mengalami kenaikan, kemudian sesudah masa pandemi mengalami penurunan. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada masa sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi terus mengalami peningkatan. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang tidak bisa diperhitungkan, mengingat Pemerintah Kabupaten Batang tidak mempunyai utang jangka panjang dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Rasio Solvabilitas Layanan sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19 terus meningkat.*

*Kata kunci:* Kinerja Keuangan, COVID-19, Kabupaten Batang

## **ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE BATANG DISTRICT GOVERNMENT BEFORE, DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC**

## *Abstract*

*The COVID-19 pandemic has had a very broad impact on the economic sector, including the Batang Regency Government, which is refocusing and reallocating the budget as a step to accelerate the response to COVID-19 in accordance with provisions related to budget reallocation, both sourced from transfer funds and income adjustments and regional shopping. The aim of this research is to assess the financial management performance of Batang Regency before the COVID-19 pandemic, during the COVID-19 pandemic and after the COVID-19 pandemic when viewed from the ratio of financial independence, financial flexibility, operational solvency, short-term solvency, long-term solvency and service solvency. This research uses quantitative descriptive*

*methods. The results of this research show that the Financial Performance of Batang Regency, when viewed from the average ratio of Financial Independence before the pandemic, during the pandemic and after the COVID-19 pandemic, has increased. Judging from the Financial Flexibility Ratio, during the pandemic it actually increased, and after the pandemic it decreased. The Operational Solvency Ratio during the pandemic increased, then after the pandemic it decreased. The Short Term Solvency Ratio before the pandemic, during the pandemic and after the pandemic continued to increase. The Long-Term Solvency Ratio cannot be taken into account, considering that the Batang Regency Government does not have long-term debt in the period 2018 to 2023. The Service Solvency Ratio before the pandemic, during the pandemic and after the COVID-19 pandemic continues to increase.*

**Keywords:** *Financial Performance, COVID-19, Batang Regency*

## **PENDAHULUAN**

Penilaian terhadap kemampuan pengelolaan keuangan suatu daerah sangat penting dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 24 Maret 2020. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditentukan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam jangka waktu tertentu.

Akuntabilitas publik terdiri atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan akuntabilitas kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Dalam prakteknya, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan daerah adalah laporan pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan, yang menunjukkan keadaan keuangannya (SAP, 2022: 13). Laporan Keuangan pemerintah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2016 hingga tahun 2023, atau selama delapan tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga hampir seluruh aspek kehidupan. Sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah menggolongkan pandemi COVID-19 sebagai bencana luar biasa nasional pada tahun 2020. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi dampak COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan dapat teratasi dengan cepat.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang tahun anggaran 2020 adalah adanya refocusing dan realokasi anggaran guna percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan beberapa ketentuan terkait realokasi anggaran baik yang bersumber dari dana transfer maupun penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah.

Hingga saat ini, terdapat beberapa penelitian yang meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain penelitian oleh Kurnia, dkk. studi (2021) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas jangka pendek dan rasio solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah saat pandemi COVID-19 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sedangkan rasio solvabilitas operasional, mengalami penurunan dibanding sebelum pandemi COVID-19. Sementara untuk rasio solvabilitas jangka panjang tidak terjadi perbedaan baik sebelum maupun pada masa pandemi COVID-19.

Sejalan dengan hasil temuan Kurnia, dkk (2021), penelitian yang dilakukan oleh Demvi, dkk (2022), menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, tingkat kemandirian, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat efisiensi keuangan

pada kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami peningkatan, sedangkan efektivitas keuangan mengalami penurunan.

Penelitian Muhammad Ichlasul Amal & Puji Wibowo (2022) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Kurnia, dkk (2021) dan Demvi, dkk (2022), kinerja rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan aktivitas Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19.

### **Teori Kebijakan Publik**

Syafiie (2006:104), kebijakan merupakan perwujudan aturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan realitas dan keadaan setempat. Kebijakan publik merupakan jawaban terhadap suatu permasalahan, upaya untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah hal-hal buruk, dan sebaliknya, memperjuangkan kebaikan, inovator, melalui praktik terbaik dan tindakan yang tepat sasaran.

Keban (2004:55) dalam Arifin (2014:39), kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan, kebijakan sebagai suatu produk dianggap sebagai sekumpulan kesimpulan atau rekomendasi, dan kebijakan sebagai suatu proses dianggap sebagai suatu metode yang dapat digunakan oleh suatu organisasi. Kebijakan merinci apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme untuk mewujudkan produk, dan kebijakan sebagai kerangka adalah proses negosiasi untuk mengembangkan tema dan metode implementasinya.

Sementara, menurut Parsons (2006), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau rencana yang mencakup tujuan politik. Kata politik mempunyai arti politik sebagai logika yang merupakan perwujudan dari penilaian. Kebijakan merupakan upaya untuk mendefinisikan dan mengembangkan alasan perlu atau tidaknya mengambil suatu tindakan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Holung dkk. (2021), Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian hasil kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang sudah ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan hukum selama periode anggaran. Pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk rasio-rasio keuangan daerah. Organisasi sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum dan layanan publik lainnya, yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, setidaknya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan serta mengambil tanggung jawab publik dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi. (Mardiasmo, 2002:121).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menilai kemandirian keuangan daerah, melakukan analisis mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, menilai seberapa efisien pendapatan daerah digunakan, dan

memeriksa pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan belanja daerah dalam periode waktu tertentu. (Pilat & Morasa, 2017; Muthia, 2016).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai bahan informasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan para pemakainya. (Harahap, 2007). Lebih lanjut, menurut Bastian (2010:297) tujuan khusus dari pelaporan keuangan sektor publik antara lain adalah untuk memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

### **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat IPKD) merupakan suatu ukuran yang ditentukan dengan seperangkat dimensi dan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengukuran indeks ini adalah untuk 1). Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2). Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; 3). Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota; 4). Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki IPKD berpredikat terbaik secara nasional; 5). Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Pada pasal 11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 disebutkan bahwa salah satu dari 6 (enam) dimensi IPKD adalah kondisi keuangan daerah yang mencakup 6 (enam) indikator, yaitu:

#### **1. Kemandirian Keuangan**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dari sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki atau sumber pendanaan yang memang dalam kendali atau pengaruhnya. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan atau total pendapatan daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Rumus Kemandirian Keuangan :

$$Kemandirian\ Keuangan = \frac{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Total\ Pendapatan}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

**Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah**

Nilai Rasio (%)	Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Sangat Rendah	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

## 2. Fleksibilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, fleksibilitas keuangan merupakan kondisi dimana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangannya ketika terjadi peningkatan tuntutan kewajiban/komitmen yang lebih tinggi, baik dengan peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang. Fleksibilitas keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan (Galuh, 2024), nilai indeks fleksibilitas keuangan suatu daerah yang rendah atau kurang dari 1 (satu), menjadi petunjuk bahwa daerah tersebut belum cukup baik dalam memprediksi dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga.

Rumus Fleksibilitas Keuangan :

$$Fleksibilitas\ Keuangan = \frac{(Total\ Pendapatan - DAK)}{(Total\ Kewajiban + Belanja\ Pegawai)}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

## 3. Solvabilitas Operasional

Solvabilitas Operasional diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kewajiban operasional pemerintahannya dalam satu periode anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Rumus Solvabilitas Operasional :

$$Solvabilitas\ Operasional = \frac{(Total\ Pendapatan\ LO - Pendapatan\ DAK - LO)}{Total\ Beban\ LO}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

#### 4. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek merupakan petunjuk mengenai bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Menurut Ritonga (2014) dalam Galuh (2024:6) utang daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun atau 12 (dua belas) bulan, di neraca dianggap sebagai kewajiban lancar, sedangkan sumber daya yang tersedia dan dijadwalkan untuk digunakan dalam periode yang sama dianggap sebagai aset lancar.

Rumus Solvabilitas Jangka Pendek :

$$\text{Solvabilitas Jangka Pendek} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

#### 5. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Rumus Solvabilitas Jangka Panjang :

$$\text{Solvabilitas Jangka Panjang} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

#### 6. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas Layanan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi dan memelihara kewajiban pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Rumus Solvabilitas Layanan :

$$\text{Solvabilitas Layanan} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dalam rangka untuk melakukan analisis mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Batang sebelum, selama dan sesudah pandemi COVID-19 pada tahun 2018-2023 dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Variabel yang akan dianalisis antara lain rasio kemandirian keuangan, tingkat fleksibilitas

keuangan, rasio solvabilitas operasional, rasio solvabilitas jangka pendek, rasio solvabilitas jangka panjang serta rasio solvabilitas layanan.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif, yaitu data yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Batang yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, periode tahun 2018-2023 dan data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Batang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan variabel-variabel yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian keuangan, tingkat fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasional, rasio solvabilitas jangka pendek, rasio solvabilitas jangka panjang serta rasio solvabilitas layanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

#### Kemandirian Keuangan

Tabel 2 Perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi, selama masa pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

	Tahun Anggaran	Total PAD	Total Pendapatan	Kemandirian Keuangan
Sebelum Pandemi	2018	237.547.973.048,00	1.701.877.299.154,00	13,96
	2019	245.836.087.092,28	1.769.958.202.416,28	13,89
	<b>Rata-rata</b>			
				<b>13,92</b>
Selama Pandemi	2020	257.422.866.095,46	1.733.087.893.276,46	14,85
	2021	322.789.372.917,64	1.821.822.580.994,64	17,72
	<b>Rata-rata</b>			
				<b>16,29</b>
Sesudah Pandemi	2022	300.965.373.375,01	1.746.815.720.778,01	17,23
	2023	327.784.151.481,65	1.807.569.985.808,65	18,13
	<b>Rata-rata</b>			
				<b>17,68</b>



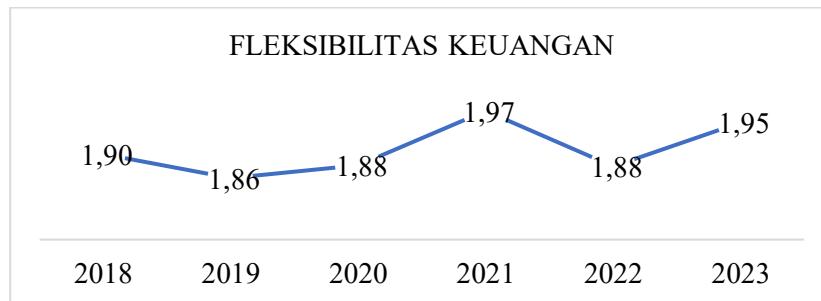
Gambar 1 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Batang tahun 2018-2023

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi sebesar 13,96 dan 13,89 atau rata-rata 13,92. Selama masa pandemi sebesar 14,85 dan 17,72, atau secara rata-rata sebesar 16,29%. Sedangkan sesudah masa pandemi COVID-19 menjadi 17,23 dan 18,13 atau rata-rata sebesar 17,68.

### Fleksibilitas Keuangan

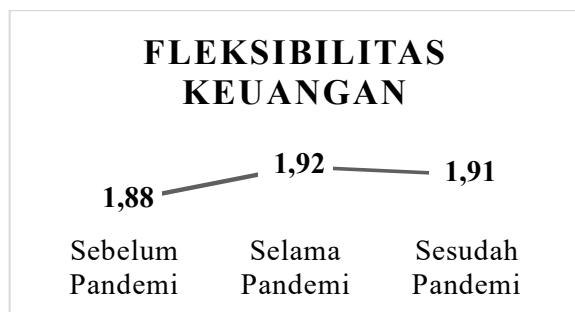
Tabel 3 Perhitungan rasio Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

	Tahun Anggaran	Total Pendapatan	DAK	Kewajiban	Belanja Pegawai	Fleksibilitas Keuangan
Sebelum Pandemi	2018	1.701.877.299.154,00	231.124.509.384,00	39.312.859.060,20	735.764.418.239,00	1,90
	2019	1.769.958.202.416,28	241.894.552.158,00	68.235.077.312,00	755.022.216.774,00	1,86
<b>Rata-rata</b>						<b>1,88</b>
Selama Pandemi	2020	1.733.087.893.276,46	227.750.085.565,00	65.237.751.266,34	736.483.205.203,00	1,88
	2021	1.821.822.580.994,64	264.596.105.123,00	53.052.796.430,67	736.685.014.763,00	1,97
<b>Rata-rata</b>						<b>1,92</b>
Sesudah Pandemi	2022	1.746.815.720.778,01	311.296.754.315,00	36.528.021.150,66	728.689.787.535,00	1,88
	2023	1.807.569.985.808,65	287.239.805.543,00	51.548.481.628,73	727.519.485.187,00	1,95
<b>Rata-rata</b>						<b>1,91</b>



Gambar 2 Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Batang tahun 2018-2023

Fleksibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Batang rata-rata sebelum masa pandemi sebesar 1,88, rata-rata selama masa pandemi 1,92, dan rata-rata sesudah pandemi menjadi 1,91.



Gambar 3 rata-rata Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

## Solvabilitas Operasional

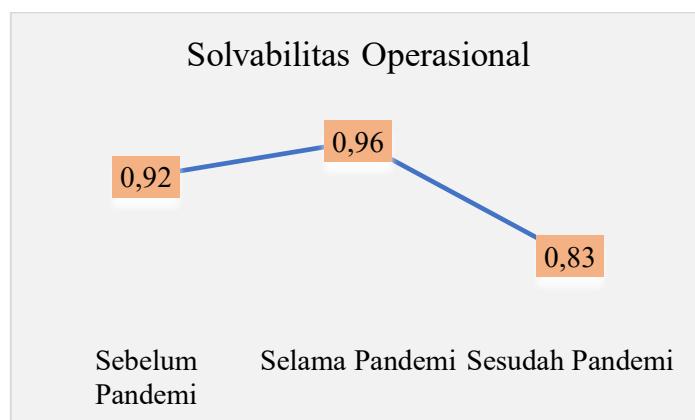
Tabel 4 Perhitungan rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

	Tahun Anggaran	Pendapatan LO	Pendapatan DAK - LO	Total Beban	Solvabilitas Operasional
Sebelum Pandemi	2018	1.569.817.452.453,77	231.124.509.384,00	1.454.187.214.096,88	0,92
	2019	1.620.191.916.780,82	241.894.552.158,00	1.499.348.472.596,04	0,92
		<b>Rata-rata</b>			<b>0,92</b>
Selama Pandemi	2020	1.716.471.508.263,58	227.750.085.565,00	1.468.998.397.324,54	1,01
	2021	1.616.817.296.245,27	264.596.105.123,00	1.492.708.262.696,02	0,91
		<b>Rata-rata</b>			<b>0,96</b>
Sesudah Pandemi	2022	1.607.316.944.873,97	311.296.754.315,00	1.546.713.852.528,91	0,84
	2023	1.601.641.618.906,08	287.239.805.543,00	1.589.400.440.373,95	0,83
		<b>Rata-rata</b>			<b>0,83</b>



Gambar 4 Solvabilitas Operasional Kabupaten Batang tahun 2018-2023

Solvabilitas operasional rata-rata Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi 0,92, selama masa pandemi mengalami kenaikan 0,04 menjadi 0,96, dan sesudah pandemi COVID-19 menurun sebesar 0,13 menjadi 0,83.



Gambar 5 rata-rata Solvabilitas Operasional Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

## Solvabilitas Jangka Pendek

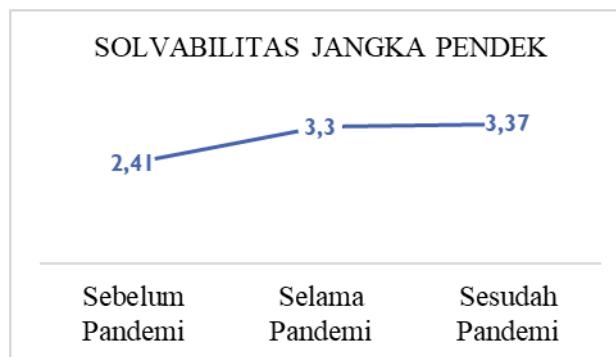
Tabel 5 Perhitungan rasio Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

	Tahun Anggaran	Kas dan Setara Kas	Investasi Jangka Pendek	Kewajiban Lancar	Solvabilitas Jangka Pendek
Sebelum Pandemi	2018	101.904.425.558,58	0,00	36.377.284.647,20	2,80
	2019	124.466.702.829,86	5.760.000,00	61.873.712.130,00	2,01
				<b>Rata-rata</b>	<b>2,41</b>
Selama Pandemi	2020	174.931.063.507,13	5.760.000,00	65.237.751.266,34	2,68
	2021	207.726.758.542,77	11.520.000,00	53.052.796.430,67	3,92
				<b>Rata-rata</b>	<b>3,30</b>
Sesudah Pandemi	2022	144.464.768.557,78	11.520.000,00	36.528.021.150,66	3,96
	2023	143.737.434.065,43	11.520.000,00	51.548.481.628,73	2,79
				<b>Rata-rata</b>	<b>3,37</b>



Gambar 6 Solvabilitas Jangka Pendek Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

Rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi COVID-19 rata-rata sebesar 2,41, selama masa pandemi COVID-19 meningkat sebesar 0,89 menjadi 3,30 dan sesudah masa pandemi COVID-19 rata-rata solvabilitasnya 3,37.



Gambar 7 Rata-rata Solvabilitas Jangka Pendek Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

## Solvabilitas Jangka Panjang

Tabel 6 Perhitungan rasio Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

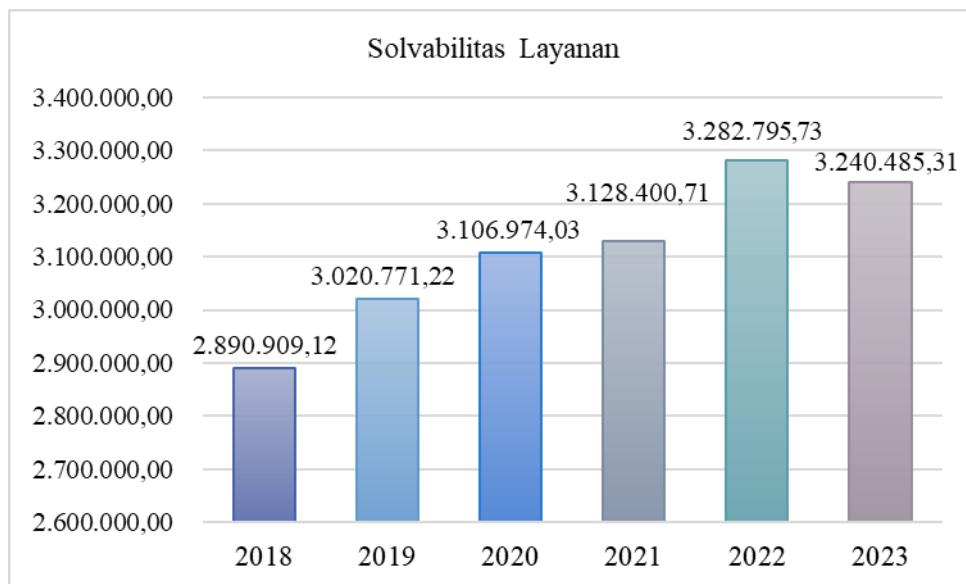
	Tahun Anggaran	Aset Tetap	Kewajiban Jangka Panjang	Solvabilitas Jangka Panjang
Sebelum Pandemi	2018	2.203.962.625.911,14	0,00	-
Pandemi	2019	2.321.713.408.108,26	0,00	-
	<b>Rata-rata</b>			
Selama Pandemi	2020	2.490.917.003.967,70	0,00	-
Pandemi	2021	2.535.234.040.142,35	0,00	-
	<b>Rata-rata</b>			
Sesudah Pandemi	2022	2.682.372.387.472,76	0,00	-
Pandemi	2023	2.685.983.181.964,96	0,00	-
	<b>Rata-rata</b>			

Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang tidak bisa diperhitungkan, mengingat Pemerintah Kabupaten Batang tidak mempunyai utang jangka panjang dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Dengan demikian, solvabilitas jangka panjang Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi COVID-19 (tahun 2018 & 2019), selama masa pandemi COVID-19 (tahun 2020 & 2021) dan sesudah masa pandemi COVID-19 (2022-2023) tidak dapat dibandingkan. Meskipun demikian, aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang, yang merupakan salah satu faktor penentu solvabilitas jangka panjang, terus meningkat selama periode tahun 2018-2023.

## Solvabilitas Layanan

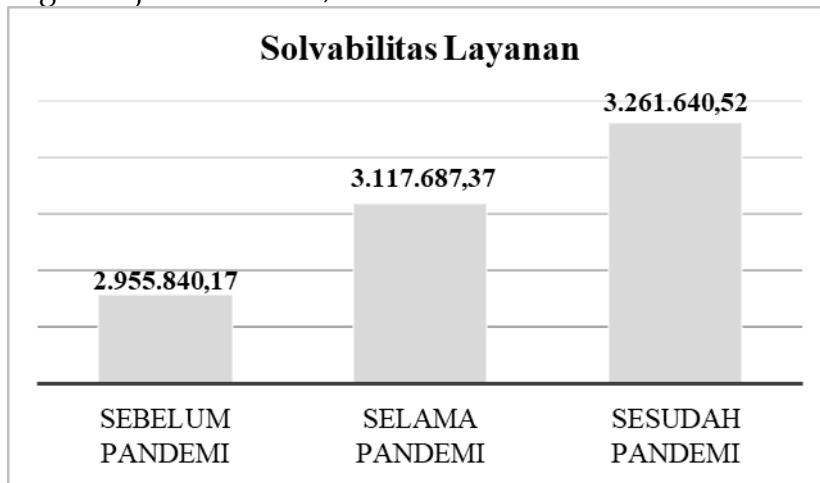
Tabel 7 Perhitungan rasio Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi, selama pandemi dan sesudah pandemi tahun 2018-2023

	Tahun Anggaran	Aset Tetap	Jumlah Penduduk	Solvabilitas Layanan
Sebelum Pandemi	2018	2.203.962.625.911,14	762.377,00	2.890.909,12
Pandemi	2019	2.321.713.408.108,26	768.583,00	3.020.771,22
	<b>Rata-rata</b>			
Selama Pandemi	2020	2.490.917.003.967,70	801.718,00	3.106.974,03
Pandemi	2021	2.535.234.040.142,35	810.393,00	3.128.400,71
	<b>Rata-rata</b>			
Sesudah Pandemi	2022	2.682.372.387.472,76	817.100,00	3.282.795,73
Pandemi	2023	2.685.983.181.964,96	828.883,00	3.240.485,31
	<b>Rata-rata</b>			



Gambar 8 Solvabilitas Layanan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

Rasio solvabilitas layanan rata-rata Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi COVID-19, sebesar 2.955.840,17, selama masa pandemi COVID-19 meningkat menjadi 3.117.687,37, dan sesudah masa pandemi COVID-19 meningkat lagi menjadi 3.261.640,52.

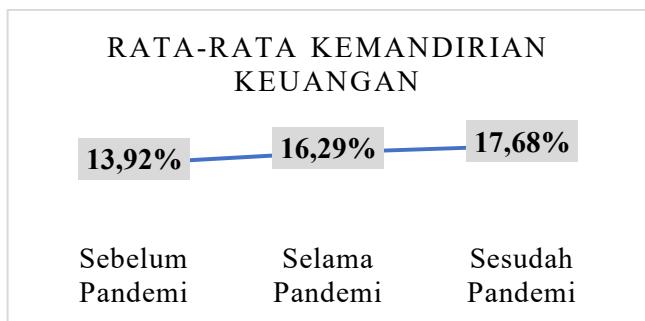


Gambar 9 Rata-rata Solvabilitas Layanan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

## Pembahasan

### Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Batang selama periode 2018-2023 terus meningkat. Bahkan ketika masa pandemi COVID-19, tingkat kemandirian keuangan secara rata-rata justru meningkat 2,36% dari rata-rata sebelum pandemi 13,92% menjadi 16,29%. Peningkatan kemandirian keuangan rata-rata setelah pandemi sebesar 1,40%, dari selama masa pandemi sebesar 16,29% menjadi 17,68%.



Gambar 10 Rata-rata Kemandirian Keuangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

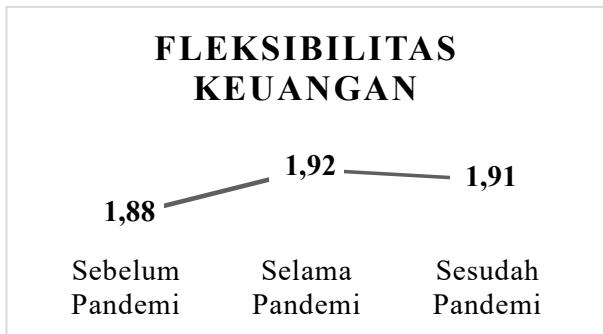
Kenaikan ini tidak lepas dari terus meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Batang, baik sebelum pandemi, selama masa pandemi maupun sesudah pandemi COVID-19. Hal ini menjadi petunjuk bahwa Pemerintah Kabupaten Batang konsisten pada upaya untuk terus menggali dan meningkatkan potensi PAD yang ada. Dimana saat yang sama, terutama pada saat pandemi COVID-19 (2020-2021), pemerintah daerah lain, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten & Kota mayoritas mengalami penurunan PAD.

Peningkatan rata-rata rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ini sesuai dengan hasil dari penelitian Kurnia, dkk (2021), yang menemukan bahwa rasio kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hasil ini juga selaras dengan hasil penelitian Demvi, dkk (2022), dimana saat masa pandemi COVID-19, rasio kemandirian pada kabupaten & kota di Jawa Barat mengalami peningkatan. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Muhammad Ichlasul Amal & Puji Wibowo (2022) yang mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada periode pandemi COVID-19.

Sesuai dengan konsep tingkat kemandirian keuangan, maka tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Batang masih sangat rendah, yaitu rata-rata 15,96% (< 25%), yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Batang untuk membiayai sendiri kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dari sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki juga masih sangat rendah.

### Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan Kabupaten Batang mengalami fluktuasi, baik sebelum pandemi, saat pandemi dan sesudah pandemi. Fleksibilitas sebelum pandemi rata-rata 1,88, saat pandemi justru mengalami peningkatan menjadi 1,92, dan pasca pandemi menurun menjadi 1,91. Dengan nilai fleksibilitas diatas 1 (satu), ini berarti Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyesuaikan sumber daya keuangannya dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan yang tidak terduga.

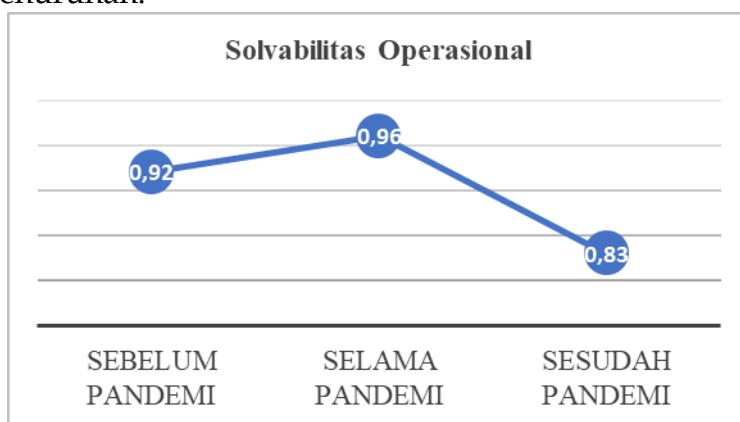


Gambar 11 Rata-rata Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

Kenaikan fleksibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Batang saat pandemi, dari sebelumnya rata-rata 1,88 menjadi 1,92, menunjukkan kesamaan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19 rasio fleksibilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding sebelum pandemi COVID-19.

### Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional rata-rata Pemerintah Kabupaten Batang sebelum pandemi sebesar 0,92, saat masa pandemi mengalami kenaikan 0,04 menjadi 0,96, kemudian sesudah masa pandemi mengalami penurunan 0,13 menjadi 0,83. Hasil ini menunjukkan bahwa saat masa pandemi, kapabilitas atau kemampuan Pemerintah Kabupaten Batang dalam memenuhi beban operasionalnya selama periode anggaran mengalami peningkatan, akan tetapi, sesudah masa pandemi, mengalami penurunan.



Gambar 12 Rata-rata Solvabilitas Operasional Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

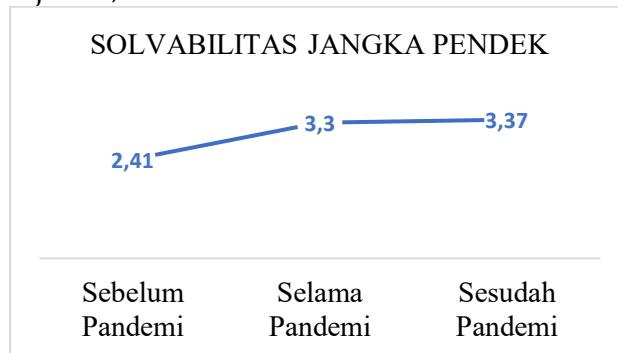
Solvabilitas operasional Kabupaten Batang saat masa pandemi COVID-19 rata-rata 0,96 atau meningkat dibanding sebelum masa pandemi yang sebesar 0,92. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Kurnia, dkk (2021) yang menemukan bahwa rasio solvabilitas operasional Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih rendah dibanding sebelum masa pandemi COVID-19.

Rata-rata Solvabilitas operasional Pemerintah Kabupaten Batang selama kurun waktu 2018-2023 0,90 atau kurang dari 1 (satu), ini berarti kemampuan Kabupaten Batang untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kewajiban operasional pemerintahannya dalam satu periode anggaran masih rendah.

### Solvabilitas Jangka Pendek

Rata-rata rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, yang berarti bahwa kemampuan aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang untuk menutup setiap kewajiban lancarnya terus meningkat. Sebelum masa pandemi COVID-19 (2018-2019), solvabilitas jangka pendeknya rata-rata 2,41, pada masa pandemi (2020-2021) rata-rata solvabilitas jangka pendeknya meningkat sebesar 0,89 menjadi 3,30 dan sesudah masa pandemi (2022-2023) rata-rata solvabilitas jangka pendeknya meningkat lagi menjadi 3,37.



Gambar 13 Rata-rata Solvabilitas Jangka Pendek Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

Jika dilihat pertahun, rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kabupaten Batang mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 solvabilitas jangka pendeknya sebesar 2,80, tahun berikutnya (2019) menurun sebesar 0,79 menjadi 2,01. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 2,68, meskipun masih lebih rendah dibanding tahun 2018. Pada tahun 2021, solvabilitas jangka pendeknya meningkat 1,23 dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 3,92. Pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 3,96, namun pada tahun 2023 menurun sebesar 1,17 dibanding tahun 2022, menjadi 2,79. Fluktuasi ini tidak lepas dari fluktuasi (kenaikan dan penurunan) kas & setara kas serta kewajiban lancar Pemerintah Kabupaten Batang selama kurun waktu tersebut.

Hasil penelitian mengenai rasio solvabilitas jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Batang ini, sesuai dengan hasil analisis Kurnia, dkk (2021) yang menemukan bahwa pada masa pandemi COVID-19 rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

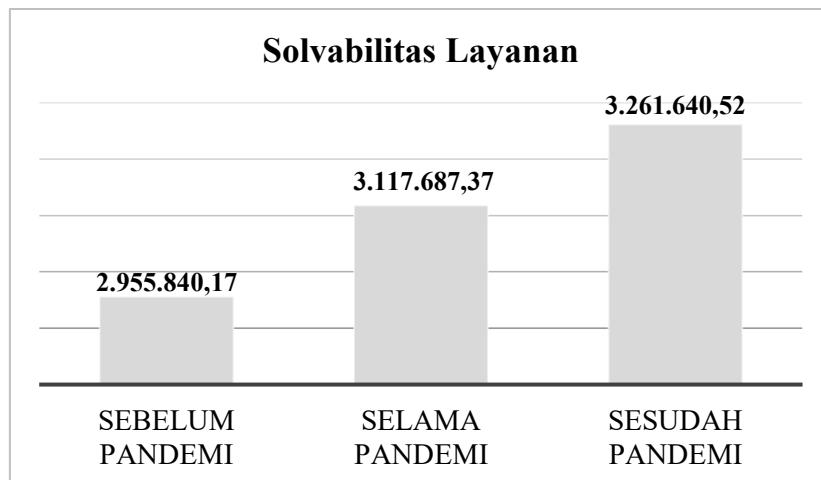
### Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang tidak bisa diperhitungkan, mengingat Pemerintah Kabupaten Batang tidak mempunyai utang jangka panjang dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Dengan demikian, solvabilitas jangka panjang Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi (2018-2019), selama masa pandemi (2020-2021) dan sesudah masa pandemi (2022-2023) tidak dapat dibandingkan. Meskipun demikian, aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang, yang merupakan salah satu faktor penentu solvabilitas jangka panjang, terus meningkat selama periode tahun 2018-2023. Ini berarti, jika dalam kurun waktu yang sama, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki utang jangka Panjang yang nilainya stagnan, maka rasio solvabilitas jangka panjang akan meningkat.

Hasil dari penelitian mengenai rasio solvabilitas jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Batang ini sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio solvabilitas jangka panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, baik sebelum maupun pada masa pandemi COVID-19.

### Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Batang selama periode 2018-2023 mengalami peningkatan, ini artinya bahwa kemampuan atau kapabilitas Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakatnya terus mengalami peningkatan. Sebelum masa pandemi COVID-19, solvabilitas layanan rata-rata Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 2.955.840,17, selama masa pandemi COVID-19 meningkat menjadi 3.117.687,37, dan sesudah masa pandemi COVID-19 meningkat lagi menjadi 3.261.640,52.



Gambar 14 Rata-rata Solvabilitas Layanan Kabupaten Batang Tahun 2018-2023

Jika dilihat pertahun, solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Batang juga terus meningkat, meskipun pada saat masa pandemi COVID-19 (2020-2021). Tahun 2019 sebesar 3.020.771,22, meningkat sebesar 129.862,10 dibanding tahun

2018 yang sebesar 2.890.909,12. Pada tahun 2020, solvabilitas pelayanan sebesar 3.106.974,03, meningkat 86.202,81 dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 21.426,69 menjadi 3.128.400,71 dibanding tahun 2020. Tahun 2022 juga meningkat sebesar 154.395,01, dibanding tahun 2021 menjadi 3.282.795,73, dan justru menurun pada tahun 2023, 42.310,42 dibanding tahun 2022.

Hasil penelitian mengenai solvabilitas layanan ini menunjukkan hal yang tidak berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2021) yang menemukan bahwa rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum merebaknya pandemi COVID-19.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.:

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi COVID-19, selama masa pandemi COVID-19 dan sesudah masa pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan, meskipun tingkat kemandirian keuangannya masih sangat rendah, terakhir di tahun 2023 sebesar 18,13% (dibawah 25%), yang berarti tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan diluar kendali atau pengaruhnya sangat tinggi.
2. Tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengalami fluktuasi, baik sebelum pandemi, saat pandemi dan sesudah pandemi. Fleksibilitas Keuangan saat pandemi justru mengalami peningkatan, dan pasca pandemi mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang di masa pandemi COVID-19 cukup fleksibel, sehingga mampu mengelola atau mengatur sumber daya keuangan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan yang tidak terduga.
3. Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Batang pada masa pandemi justru mengalami kenaikan, kemudian sesudah masa pandemi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi, kapabilitas atau kemampuan Pemerintah Kabupaten Batang dalam memenuhi beban operasionalnya selama periode anggaran justru mengalami peningkatan.
4. Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi, selama masa pandemi dan sesudah masa pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan, yang berarti bahwa kemampuan aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang untuk menutup kewajiban lancarnya terus meningkat.
5. Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang tidak bisa diperhitungkan, mengingat Pemerintah Kabupaten Batang tidak mempunyai utang jangka panjang dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Dengan demikian, solvabilitas jangka panjang Pemerintah Kabupaten Batang

sebelum masa pandemi, selama masa pandemi dan sesudah masa pandemi COVID-19 tidak dapat dibandingkan.

6. Tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Batang sebelum masa pandemi, selama masa pandemi dan sesudah masa pandemi COVID-19 terus meningkat, ini artinya bahwa kemampuan atau kapabilitas Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakatnya terus mengalami peningkatan.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung rasio kinerja keuangan berupa 1). rasio kemandirian keuangan; 2). rasio fleksibilitas keuangan; 3). rasio solvabilitas operasional; 4). rasio solvabilitas jangka pendek; 5). rasio solvabilitas jangka Panjang; dan 6). rasio solvabilitas layanan. Sedangkan untuk dapat menghitung indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dalam rangka mengevaluasi kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, indeks Pengalokasian Anggaran Belanja pada APBD, indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, indeks Penyerapan Anggaran, indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Opini BPK.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melakukan pengukuran indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah dan Opini BPK.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyusunan artikel ini hingga selesai tidak lepas dari adanya motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik tenaga, pikiran maupun materi. Dalam prosesnya, penulis menemukan kesulitan dan hambatan, namun semua itu justru menjadi penyemangat karena adanya motivasi dan dorongan tersebut, sehingga penyusunan artikel ini dapat penulis selesaikan. Untuk istriku, Ida Anita Rizqiyah, atas pengorbanan dalam mendampingi, mencerahkan doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan semangat dalam segala hal, terkhusus dalam menyelesaikan artikel ini. Juga Anak-anak ku tercinta yang terus menjaga semangat dan motivasi. Bapak dan Ibu serta keluarga yang terus memberikan dorongan dan do'a restunya.

Bapak Dr. Usamah, SE., M.Si, dan Ibu Rini Hidayah, SE., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing, yang selalu sabar & tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan, meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan dan bimbingan agar penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terima kasih atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingannya.

Bapak dan Ibu dosen, serta segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPP, terima kasih atas ilmu yang sudah diajarkan, terimakasih atas segala bantuanmu selama ini, terimakasih atas pengorbanan dan perjuangan dalam memberikan pendidikan, semoga menjadi amal yang kemanfaatannya terus berkembang dan berlimpah.

Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Batang yang senantiasa mendukung penulis selama masa studi, terimakasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ini.

## REFERENSI

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Demvi, V., dkk. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat).
- Galuh, A.J. 2024. Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- Holung, R., Lalenoh, Kawung, G., M. V, dan Steeva, T. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9, 869-877. (<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/embav9i1.32595>)
- KSAP (SAP2022) <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah & Rini Hidayah. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Ichlasul Amal & Puji Wibowo (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45-56.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Rohana, Astra. (2021). Analisis Solvabilitas Layanan Dan Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: ALFABETA.